

Probity Advice

2 September 2020

PROBITY ADALAH TINDAKAN/PERBUATAN YANG MENERAPKAN PRINSIP KEJUJURAN, INTEGRITAS DAN KEBENARAN

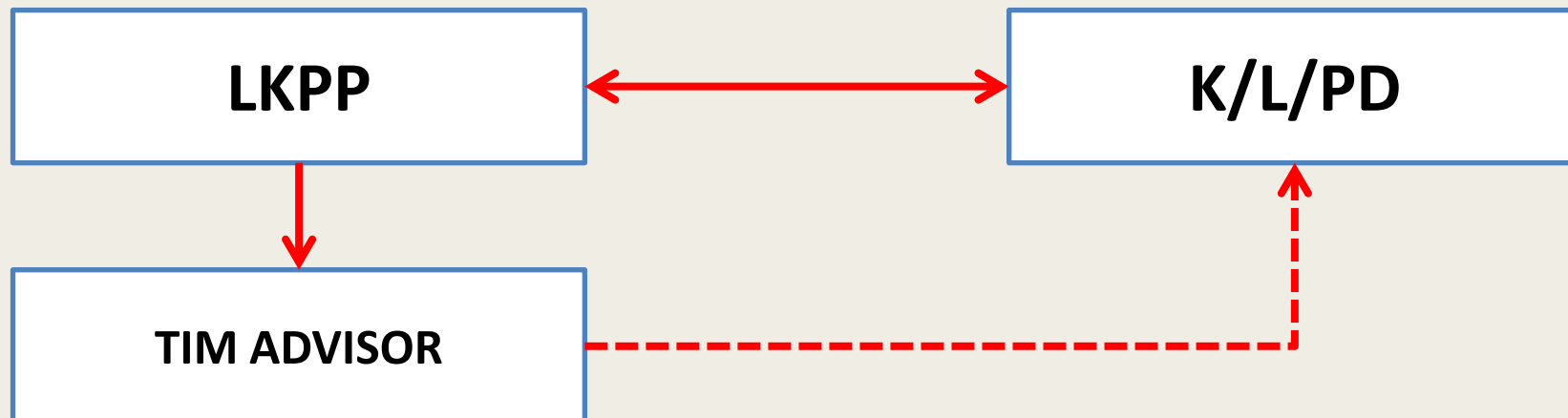
PROBITY ADVICE ADALAH PEMBERIAN PENDAPAT/ADVICE PADA TIAP TAHAPAN PENGADAAN YANG MENERAPKAN PRINSIP PROBITY SEKALIGUS MITIGASI RISIKO

PERBEDAAN PROBITY ADVICE DAN PROBITY AUDIT

	PELAKSANA	LEMBAGA	PERAN
PROBITY ADVICE	ADVISOR	LKPP	QUALITY ASSURANCE
PROBITY AUDIT	AUDITOR	BPKP	QUALITY CONTROL

TIM ADVISOR ADALAH TIM YANG BERJUMLAH GASAL SEKURANG-KURANGNYA 3 (TIGA) ORANG UNTUK MELAKUKAN PROBITY ADVICE DALAM PENGADAAN

ADVISEE ADALAH PIHAK YANG DIBERIKAN LAYANAN PROBITY ADVICE (PA/KPA, PPK, POKJA, ULP dan PPHP)



IMPLEMENTASI PROBITYADVICE

- Belanja pemerintah melalui pengadaan meningkat
- Kompleksitas meningkat
- Sarat Kepentingan

- Tidak Menghasilkan Best Value For Money
- Partisipasi Pelaku Usaha Rendah
- Terjadi Permasalahan Hukum (Persaingan Usaha, Pidana, dll)
- Terdapat Pengaduan (Penyimpangan Prosedur, KKN, Persaingan Usaha Tidak Sehat)

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERANCAM

Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Yang Layak Sesuai
Dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik

DAMPAK

Berkurangnya
kepercayaan
masyarakat atas
layanan publik dari
pemerintah

1

- Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan *value for money*

2

- Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa

3

- Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa

4

- Mengurangi resiko sengketa, pengaduan atau permasalahan hukum

5

- Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bebas konflik kepentingan dan adil



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KRITERIA PAKET YANG DAPAT DIDAMPINGI

PROBITY ADVICE



ALUR PERMOHONAN PROBITY ADVICE



2

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah menerima dan mengevaluasi permohonan Probity Advice :

- Jika disetujui, maka dibentuk **Tim Probity Advisor** dan Surat Persetujuan pelaksanaan Probity Advice
- Jika tidak disetujui, maka akan dikirimkan surat penolakan atau permintaan penyempurnaan dokumen kepada **K/L/PD**



Advisee (K/L/PD) menyampaikan permintaan Probity Advice terhadap paket Pengadaan Barang/Jasa kepada **Direktur Advokasi Pemerintah Daerah**

1



3

Jika DITERIMA maka **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah** membentuk dan mengeluarkan Surat Tugas (ST) **Tim Probity Advisor** yang selanjutnya diterima oleh **Advisor dan Advisee**

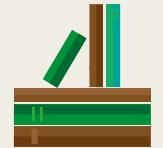
MEKANISME / ALUR PERSIAPAN PROBITY ADVICE



2

Advisee menyampaikan dokumen - dokumen terkait paket pengadaan yang akan dilakukan **Probity Advice** ke **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah**

1



Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

menerima dan mempelajari dokumen yang disampaikan oleh **Advisee** :

- Apabila lengkap, maka **Advisee** dan **Advisor** akan diundang untuk melakukan **Entry Meeting**
- Apabila tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan **ke Advisee untuk dilengkapi**

3



Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mengirimkan Surat Undangan kepada **Advisee** dan **Tim Advisor Probity** untuk dilakukan **Entry Meeting**

ALUR ENTRY MEETING PROBITY ADVICE

1 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mengundang **Tim Advisor Probity** dan **Advisee** untuk melakukan **Entry Meeting**



2



Setelah menerima undangan, **Tim Advisor Probity** dan **Advisee** melakukan pertemuan untuk membahas **Probity Plan** dan menyepakati **Probity Plan** tersebut

3

Tim Advisor Probity menyampaikan hasil kesepakatan **Probity Plan** yang telah dibuat ke **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah**





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ALUR PELAKSANAAN PROBITY ADVICE



2

Advisee dan **Tim Advisor Probity** menerima undangan untuk melakukan serta melaksanakan **Probity Advice**, kemudian membuat laporan **Probity Advice** yang nantinya diserahkan ke **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah**

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mengundang **Advisee** dan **Tim Advisor Probity** untuk melakukan **Probity Advice**

1



3

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah menerima Laporan **Probity Advice** yang telah dilaksanakan oleh **Tim Advisor Probity**



GAMBARAN LAYANAN PROBITY ADVICE

Advisor :

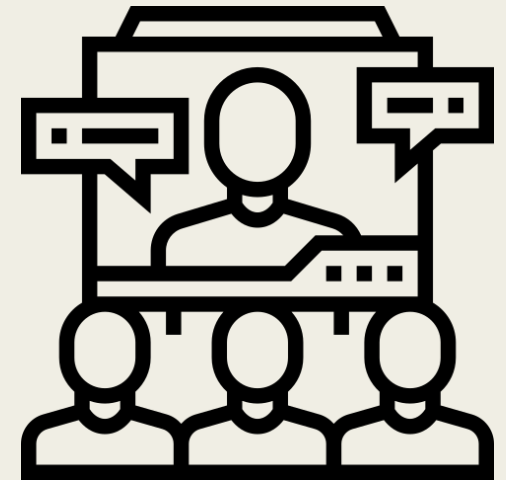
1. ASN dan Non-ASN
2. Kompetensi di bidang Pengadaan
3. Berintegritas
4. Tersebar Sebagian Besar Provinsi

- 01 Sistem aplikasi permohonan layanan
- 02 Pemilihan Advisor berdasarkan Domisili dan Kompetensi Teknis

Advisee :

1. Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah
2. BUMN/ BUMD
3. BLU

**Pengembangan Aplikasi
Probity Advice**



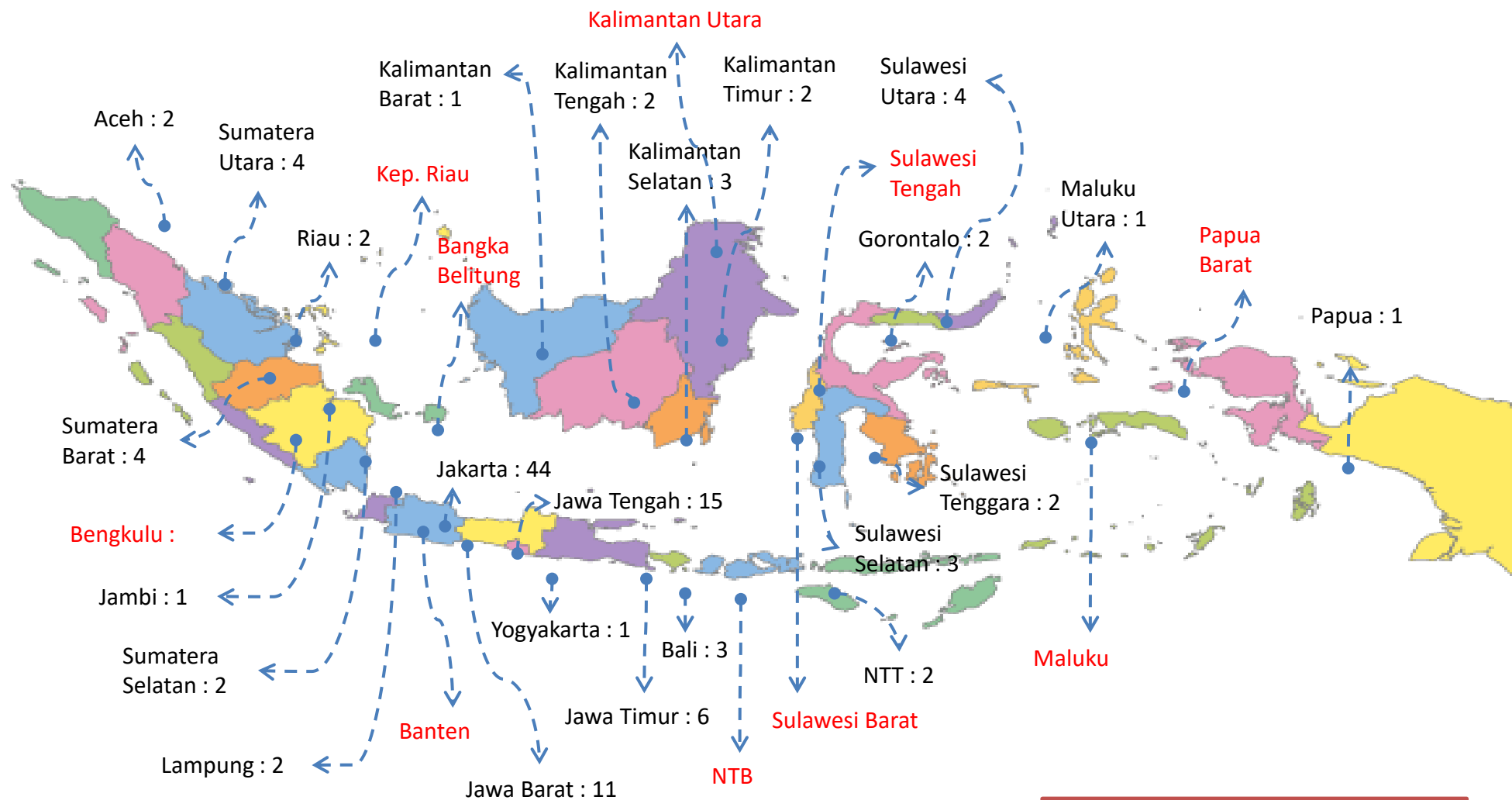


LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PETA LAYANAN PROBITY ADVICE

Sebaran Advisor Probitry Advice



Total Jumlah Advisor : 116

No	K/L/PD	Paket Pengadaan	Nilai Pagu Dalam Surat
1	Pemerintah Kota Cilegon	Pembangunan Gedung Kantor Baru Setda Kota Cilegon	Rp 24,252,550,000
		Pembangunan Sport Center - Lintasan Atletik	Rp 19,935,333,000
		Pembangunan Sport Center - Tribun Timur, Utara, dan Selatan	Rp 12,000,000,000
2	Pemerintah Kabupaten Bandung	Pembangunan Gedung RSUD Soerang	Rp 324,700,000,000
3	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 Lantai RSUD dr. Iskak Tulungagung	Rp 2,476,031,500
4	Pemerintah Kabupaten Sleman	Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sleman	Rp 120,000,000,000
5	Pemerintah Kota Blitar	Pembangunan Fiber Optik Kota Blitar	Rp 9,970,000,000
		Pembangunan Gedung SMPN 3 Tahap 2	Rp 22,736,560,000
		Pembangunan Gedung Puskesmas Sukorejo	Rp 6,255,051,000
		Pembangunan Pasar Legi Kota Blitar	Rp 50,000,000,000
6	Pemerintah Kabupaten Jombang	Pembangunan RSUD Ploso	Rp 14,388,500,000
7	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pembangunan Pasar Induk Wonosobo	Rp 125,000,000,000
8	Pemerintah Kota Tegal	Pembangunan Pasar Margasari	Rp 24,000,000,000
		Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Tahap 1	Rp 14,000,000,000
9	Pemerintah Kota Malang	Pembangunan Islamic Center	Rp 55,000,000,000
		Pembangunan Gedung Bersama di Balaikota	Rp 51,000,000,000
		Pembangunan Gedung MCC	Rp 183,985,640,000
10	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan Islamic Center	Rp 58,780,000,000
		Pembangunan Rest Area	Rp 15,000,000,000
11	Pemerintah Kota Makassar	Pembangunan RS Regional Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 142,138,418,992
12	Pemerintah Kota Ternate	Pembangunan Lanjutan Reklamasi dan Jalan Kawasan Kayumerah - Kalumata Segmen Utara	Rp 35,000,000,000
		Pembangunan Lanjutan Reklamasi dan Jalan Kawasan Kayumerah - Kalumata Segmen Selatan	Rp 69,202,000,000
		Pembangunan Pasar Modern Gamalama Lanjutan	Rp 70,000,000,000
		Pembangunan Lanjutan Proklamasi Salero - Dufa	Rp 30,000,000,000
13	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemeliharaan Rutin (PRIM)	Rp 68,418,000,000
		Jasa Konsultasi Supervisi PRIM	Rp 2,000,000



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

INOVASI LAYANAN PROBITY ADVICE

DAMPAK LAYANAN PROBITY ADVICE

